

Solidaritas Perempuan Bugis dalam Ekowisata Pulau Kelapa Dua, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta

Bugis Women's Solidarity in Ecotourism Development: A Case Study of Kelapa Dua Island, North Seribu Islands District, Seribu Islands Regency, Jakarta, Indonesia

Fairuz Rafidah Aflaha¹, Widya Hasian Situmeang², & Amrina Rosyada³

^{1,3}Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

²Program Studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

fairuzrafidah@apps.ipb.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 21 Desember 2025, direvisi 19 Februari 2026, diputuskan diterima 26 April 2026

Abstract

Women's vulnerability is often linked to weak solidarity within a group. On Kelapa Dua Island, Seribu Islands Regency, Jakarta, also known as Kampung Bugis, there is a group of women of Bugis descent struggling to meet their daily needs amidst the uncertain income of their husbands, the majority of whom are former fishermen. Uncertainty about going to sea has driven husbands to change professions, and in the process, the women struggle to support their families' finances by selling products and services. One alternative livelihood pursued by the people of Kelapa Dua Island is ecotourism, given the island's famed marine beauty. Despite limited access, these women in the northern tip of Jakarta Province struggle to find a place in this male-dominated industry.

Keywords: solidarity, women, ecotourism, small island

Abstrak

Kerentanan perempuan sering dikaitkan dengan lemahnya solidaritas perempuan dalam suatu kelompok. Di Pulau Kelapa Dua, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, yang juga dikenal dengan Kampung Bugis, terdapat kelompok perempuan keturunan Bugis yang berjuang menopang kebutuhan sehari-hari di tengah ketidakpastian pendapatan suami mereka yang mayoritas adalah mantan nelayan. Ketidakpastian dalam melaut mendorong para suami untuk beralih profesi. Dalam prosesnya, para perempuan berjibaku menjadi penopang ekonomi keluarga dengan menjajakan produk atau jasa. Salah satu alternatif nafkah yang digeluti masyarakat Pulau Kelapa Dua adalah ekowisata, mengingat Pulau Kelapa Dua terkenal dengan keindahan lautnya. Dengan segala keterbatasan akses, para perempuan di ujung utara Provinsi DKI Jakarta ini berjuang mencari tempat di dalam industri yang masih didominasi laki-laki.

Kata kunci: solidaritas, perempuan, ekowisata, pulau kecil

Pendahuluan

Kepulauan Seribu merupakan salah satu kawasan strategis di utara Jakarta yang memiliki posisi geografis unik karena dikelilingi Laut Jawa di bagian utara, timur, dan barat serta berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta di bagian selatan (Bahri, Hamdani, & Wibowo 2017). Gugusan pulau ini terbentuk dari ekosistem terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati laut sehingga sejak lama menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Pada tahun 1982, atas dasar nilai ekologisnya, wilayah ini ditetapkan sebagai Cagar Alam Pulau Seribu, yang kemudian berkembang menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, taman nasional laut pertama di Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi

spesies kunci dan habitat penting, antara lain terumbu karang, ekosistem mangrove, area peneluran penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), serta habitat penyu hijau (*Chelonia mydas*). Keberadaan zona inti yang berfungsi melindungi terumbu karang, mangrove, maupun penyu menjadikan kawasan ini tidak hanya penting bagi konservasi, tetapi juga menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekowisata bahari (Runtu, Samosir, & Pratiwi 2024; Taman Nasional Kepulauan Seribu 2025).

Selain fungsi konservasi, Kepulauan Seribu juga diarahkan sebagai kawasan pembangunan berbasis kepulauan dengan fokus pada tiga hal: pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dengan daya tarik ekosistem

lautnya, Kepulauan Seribu berkembang sebagai salah satu destinasi wisata utama di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah menetapkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Taman Nasional Kepulauan Seribu diakui sebagai salah satu ASEAN Heritage Park pada 15 Maret 2017 karena keindahan alam dan keanekaragaman biota lautnya (Pristiandaru 2023). Namun, perkembangan wisata ini tidak merata, terutama di pulau-pulau kecil berpenduduk yang aksesibilitasnya terbatas.

Salah satu pulau berpenduduk yang memiliki karakteristik unik adalah Pulau Kelapa Dua, pulau permukiman terkecil di Kepulauan Seribu dengan luas hanya 1,9 hektare dan jumlah penduduk sekitar 337 jiwa (Badan Pusat Statistik 2025). Pulau ini memiliki sejarah panjang sebagai Kampung Bugis karena sebagian besar warganya merupakan keturunan pelaut Bugis Bone yang menetap sejak beberapa generasi lalu. Hingga beberapa tahun lalu, hampir seluruh laki-laki dewasa bekerja sebagai nelayan ikan dan cumi-cumi. Namun, profesi ini semakin ditinggalkan karena ketidakstabilan ekonomi. Sementara itu, kelompok perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus anggota kelompok usaha kecil. Pulau Kelapa Dua masih menyimpan jejak tradisi pesisir, seperti rumah panggung kayu dan memiliki potensi ekowisata, seperti konservasi penyau laut serta penanaman mangrove dan terumbu karang. Sayangnya, potensi ini belum dikelola secara optimal sehingga pulau ini belum banyak dikenal wisatawan.

Dalam konteks ekowisata, keberadaan masyarakat lokal khususnya perempuan, sejatinya berpotensi mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi. Akan tetapi, pengambilan keputusan dan pengembangan terkait ekowisata masih bersifat *top-down* dan pada praktiknya masih didominasi laki-laki. Di tengah keberpihakan terhadap perempuan yang masih rendah ini, perempuan Kelapa Dua melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekowisata berupaya menciptakan peluang baru, misalnya dengan menjajakan produk olahan laut, kerajinan tangan, maupun jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Dengan demikian, pengembangan ekowisata di Kepulauan Seribu tidak hanya berfungsi melestarikan lingkungan, tetapi juga membuka ruang bagi pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir (Sachoeumar 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode studi literatur, observasi, *focus group discussion* (FGD), serta wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci Pulau Kelapa Dua. Studi literatur mengangkat temuan-temuan terkait peran perempuan dalam bingkai ekowisata perairan dan karakteristik perempuan Bugis. FGD dilaksanakan pada Agustus 2025 bersamaan dengan observasi lapangan yang dilakukan tim peneliti. Hasil FGD mengungkap karakteristik dan pengalaman kelompok perempuan rantau Bugis, sedangkan observasi mengangkat rutinitas masyarakat di Pulau Kelapa Dua. Adapun wawancara mendalam memberikan pandangan baru tentang upaya perempuan Pulau Kelapa Dua untuk menopang perekonomian dan mengangkat derajat keluarga.

Terdapat 15 informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Pemilihan para informan dilakukan menggunakan teknik *snowballing* (Goodman 1961), dengan kriteria utama pada besarnya pengaruh dan pengetahuan terhadap situasi gerakan kelompok perempuan rantau Bugis Bone di lokasi penelitian. Data yang diperoleh akan diolah melalui tahapan pengelompokan data, reduksi data, dan penyajian data. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan model interaktif, yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan konfirmasi ulang (Miles, Huberman, & Saldaña 2014).

Pulau Kelapa Dua, Sebuah Kampung Bugis di Utara Jakarta

Pulau Kelapa Dua dikenal sebagai Kampung Bugis karena sekitar 90 persen dari 154 keluarga yang bermukim di pulau ini adalah suku Bugis. Menurut penuturan penduduk, generasi Bugis pertama yang datang ke Kepulauan Seribu adalah pelaut Bugis Bone. Pada mulanya, mereka datang ke Pulau Genteng pada tahun 1974. Namun, karena status mereka di Pulau Genteng masih menumpang di lahan orang lain, pemerintah menawarkan sebuah pulau yang disebut Pulau Rakitiang sebagai tempat tinggal baru komunitas Bugis. Pada tahun 1983, komunitas Bugis Pulau Genteng berbondong-bondong pindah ke Pulau Rakitiang. Selanjutnya, pulau ini diubah namanya menjadi Pulau Kelapa Dua (Yunus 2015). Amir bin Makka dan kawan-kawannya disebut-sebut sebagai pelaut Bugis Bone pertama yang menghuni Pulau Kelapa Dua. Karena penghasilan di kampung tak sebesar di Jakarta, sekitar

50 kepala keluarga Bugis memboyong keluarganya meninggalkan Sulawesi Selatan, mengikuti jejak Amir untuk mangadu nasib di Pulau Kelapa Dua. Seperti leluhurnya, kelompok pelaut Bugis ini hidup dari mencari ikan menggunakan jaring mayang. Tangkapan utamanya adalah ikan kembung dan tembang selar (Onggang 2020).

Migrasi penduduk seperti yang dilakukan oleh komunitas Bugis ini lekat dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun, kesejahteraan tersebut tidak datang dengan harga murah. Untuk bertahan hidup, komunitas Bugis Bone di Pulau Kelapa Dua harus bekerja lebih keras terutama dalam hal akses. Meskipun menjadi bagian dari ibu kota negara, letak Pulau Kelapa Dua di utara lautan Jakarta dengan fasilitas publik yang sangat terbatas membuat pembangunan menjadi jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan pembangunan di daratan utama Jakarta.

Pulau Kelapa Dua termasuk ke dalam Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan jarak sekitar 45 km dari pusat kota Jakarta. Di Kelurahan Pulau Kelapa yang menaungi 36 pulau kecil, hanya 2 pulau yang diperuntukkan untuk permukiman, yaitu Pulau Kelapa dan Pulau Kelapa Dua. Adapun pulau-pulau lainnya diperuntukkan untuk peristirahatan, pariwisata, eksplorasi minyak, dan sebagainya. Sebagai pusat permukiman, Pulau Kelapa yang memiliki luas 13,8 hektare terdiri dari 4 RW dan 28 RT serta Pulau Kelapa Dua terdiri dari 1 RW dan 3 RT (Kelurahan Pulau Kelapa 2024). Dibutuhkan waktu dua hingga tiga jam dari Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke untuk mencapai Pulau Kelapa Dua dengan kapal laut. Panjangnya rantai pasok suatu produk untuk mencapai Pulau Kelapa Dua menjadikan harga barang-barang konsumsi lebih mahal 20 hingga 40 persen dibandingkan dengan harga di daratan utama Jakarta. Ditambah lagi, posisi pulau yang berada di utara Kepulauan Seribu menjadikan akses penduduk semakin terbatas, termasuk dalam memasarkan hasil tangkapan nelayan. Lokasi yang jauh dari pusat kota ini semakin menambah tantangan nelayan pulau kecil yang sebelumnya telah diterpa ketidakpastian hasil tangkap sebagai dampak perubahan iklim.

Gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga menjadi permasalahan tersendiri bagi nelayan Pulau Kelapa Dua. Para pemuda pulau yang menjadi anak buah kapal (ABK) ramai-ramai beralih profesi menjadi pekerja pabrik karena dianggap lebih menguntungkan. Hal ini membuat nelayan kesulitan melaut karena keberadaan ABK sangat penting. Kondisi ini membuat

profesi nelayan yang semula ditekuni oleh laki-laki Pulau Kelapa Dua mulai ditinggalkan. Para suami sebagai pencari nafkah utama beralih profesi sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, atau profesi lain di luar kota. Ada pula yang membantu istrinya secara penuh waktu menjalankan usaha rumahan dengan berjualan makanan atau menjadi pekerja lepas di pemerintahan, seperti di Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dari 15 orang anggota kelompok perempuan yang menjadi narasumber peneliti, hanya dua keluarga yang sumber nafkah suaminya masih terkait dengan melaut, yakni seorang sebagai nelayan dan seorang lagi sebagai pembuat kapal.

Hal lain yang tercerabut sebagai dampak ditinggalkannya profesi nelayan adalah perayaan pesta laut. Saat nelayan masih mendominasi Pulau Kelapa dan Pulau Kelapa Dua, masyarakat mengadakan pesta laut sebagai rasa syukur yang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni. Bulan ini dipilih karena merupakan musim tangkapan ikan yang sangat melimpah. Masyarakat berbondong-bondong mengarak hasil laut di atas perahu dan bergerak mengelilingi pulau. Diadakan pula doa bersama dan lomba-lomba yang mempererat solidaritas masyarakat.

Perempuan Pulau Kelapa Dua

Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Pulau Kelapa Dua dengan segala tantangannya membuat perempuan di pulau penangkaran penyu sisik ini harus bekerja lebih keras untuk menyokong keluarga. Sejak usia belia, perempuan Pulau Kelapa Dua didorong untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan akses yang terbatas.

"Dulu (tahun 1980–1990-an) kalau mau sekolah harus menyeberang (pulau). Saya tidak bisa berenang, tetapi harus mengayuh sampan sendiri untuk ke sekolah. Listrik juga terbatas, hanya menyala dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Setiap hari seperti itu" (Ibu R 2025, Wawancara Agustus).

Rendahnya jumlah perempuan Pulau Kelapa yang dapat meneruskan pendidikan formal hingga perguruan tinggi karena sulitnya akses berdampak pada rendahnya kesempatan mereka untuk dapat memiliki pekerjaan formal. Berdasarkan observasi peneliti, perempuan yang memiliki pekerjaan formal bekerja sebagai petugas kelurahan dan guru. Kelompok ini jauh lebih sedikit dibanding kelompok ibu rumah tangga yang mendominasi Pulau Kelapa Dua. Di saat para suami tak lagi melaut berupaya mencari sumber

nafkah baru, para istri yang menjadi ibu rumah tangga memutar otak untuk turut menyokong perekonomian keluarga dengan membuka berbagai usaha yang dapat dikerjakan dari rumah, seperti katering, *laundry*, dan menjual makanan serta minuman.

Perempuan Pulau Kelapa Dua menguasai hasil usahanya. Mereka dapat memperoleh hak kepemilikan rumah dan aset-aset lain atas nama pribadi, namun ada pula yang menerapkan kepemilikan aset bersama dengan suaminya. Sebagai salah satu aset penting, kepemilikan rumah dilakukan bertahap. Jika belum memiliki tanah di pulau, pada umumnya masing-masing keluarga melakukan reklamasi mandiri dengan mengumpulkan batu karang. Setelah lahan reklamasi terbentuk, rumah dibangun di atasnya.

Dalam adat Bugis Bone, warisan diturunkan ke anak pertama laki-laki. Namun, di komunitas Bugis Pulau Kelapa Dua, adat ini telah ditinggalkan dan beralih ke hukum warisan Islam yang diadopsi oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Sebagian besar perempuan Pulau Kelapa Dua mewarisi rumah dari orang tua mereka yang merupakan generasi pendahulu komunitas Bugis Bone yang telah menetap di Pulau Kelapa Dua.

Ekowisata Pulau Kelapa Dua

Pulau Kelapa Dua memiliki potensi pengembangan yang relatif serupa dengan dua pulau di sekitarnya, yaitu Pulau Kelapa dan Pulau Harapan. Potensi tersebut meliputi pariwisata berbasis pemancingan, wisata selam, industri rumah tangga, kuliner, serta perdagangan (Taman Nasional Kepulauan Seribu 2025). Dalam ranah wisata pendidikan dan konservasi laut, berbagai kegiatan dapat dilakukan, antara lain pengenalan jenis dan manfaat mangrove melalui praktik penanaman; pengenalan biota laut dan kegiatan transplantasi karang hias; apresiasi panorama bahari dan budaya lokal masyarakat Kepulauan Seribu; pelatihan dasar menyelam dan snorkelling; serta penanaman

bibit mangrove. Selain itu, Kementerian Kehutanan telah mengembangkan arboretum mangrove yang menampung berbagai spesies mangrove khas Kepulauan Seribu. Arboretum tersebut berfungsi sebagai media pembelajaran, penelitian, wisata ilmiah, sekaligus pusat budi daya. Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat sekitar 12.000 batang mangrove yang ditanam serta mewakili sembilan jenis, yaitu *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera cylindrica*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Ceriops tagal*, *Xylocarpus granatum*, *Avicennia marina*, dan *Sonneratia alba* (Farhan & Lim 2014).

Selama satu dekade terakhir, karakteristik pengunjung Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu, menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan. Jumlah rata-rata wisatawan yang datang per hari ke Pulau Kelapa Dua adalah 5 orang per hari pada hari kerja dan mengalami puncaknya mencapai 50 orang per hari pada saat akhir pekan. Adapun rata-rata jumlah pengunjung tahun 2018 hingga 2024 adalah 20.645 orang per tahun. Harga tiket masuk ke Pulau Kelapa Dua adalah Rp7.500/orang. Pengunjung yang datang sebagian besar berasal dari wilayah metropolitan Jakarta dan sekitarnya, dengan tujuan utama berupa rekreasi dan kegiatan alam seperti menyelam dan memancing (Runtu et al. 2024; Taman Nasional Kepulauan Seribu 2024). Selain itu, wisata edukasi mengenai konservasi penyu dan mangrove juga semakin diminati, terutama oleh kelompok pelajar dan peneliti (Noor, Khazali, & Suryadiputra 2006). Sebagian besar pengunjung memiliki rentang usia antara 20 hingga 40 tahun, dengan proporsi yang lebih besar di kalangan pria (Nainggolan 2018). Meskipun demikian, Pulau Kelapa Dua masih terbilang sebagai destinasi minor dalam jaringan Kepulauan Seribu, dengan sebagian besar wisatawan cenderung memilih pulau-pulau lain yang lebih populer untuk kunjungan mereka.

Indrajaya et al. (2018) dan Runtu et al. (2024) menganalisis pengembangan ekowisata di Pulau Kelapa Dua melalui metode SWOT yang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata Pulau Kelapa Dua (Indrajaya et al. 2018; Runtu et al. 2024)

Strength	Weaknesses	Opportunities	Threats
1. Kebudayaan yang unik (Bugis).	1. Infrastruktur belum memadai (penginapan, air bersih, restoran sesuai standar).	1. Tren <i>traveling</i> generasi milenial.	1. Persaingan dengan pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu yang sudah lebih tertata dengan baik.
2. Potensi ekowisata berupa penangkaran penyu dan penanaman mangrove.	2. Terbatasnya sumber daya alam (SDM) dalam mengelola ekowisata.	2. Belum banyak pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang unik di kawasan DKI Jakarta khususnya Pulau Seribu.	2. Waktu tempuh yang cukup lama dan biaya yang relatif mahal untuk mencapai Pulau Kelapa Dua.
3. Semangat yang tinggi dari penduduk lokal untuk mau belajar sesuatu hal yang baru.	3. Belum ada aktivitas pemasaran yang baik.	3. Tidak semua pulau di DKI Jakarta memiliki potensi ekowisata seperti Pulau Kelapa Dua.	3. Perubahan iklim, seperti abrasi dan gelombang tinggi.
4. Terdapat dua jenis penyu, yaitu penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) dan penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>) sebagai daya tarik ekowisata.	4. Pengunjung kurang mendapatkan edukasi mengenai ekowisata penyu.	4. Kemajuan media sosial yang dapat membantu memasarkan produk dengan lebih mudah, murah, dan cepat.	4. Konservasi penyu mengalami gagal bertelur sehingga tidak ada obyek ekowisata.
5. Lokasi kawasan berada di tempat yang strategis, yaitu berada di antara Pulau Harapan dan Pulau Kelapa.	5. Kurangnya pemahaman pemandu wisata terhadap pengetahuan mengenai penyu dan edukasi yang ingin disampaikan kepada pengunjung.	5. Jumlah pengunjung yang banyak pada akhir pekan hingga mencapai 50 orang.	
6. Harga masuk ke area Pulau Kelapa Dua sejumlah Rp7.500 per orang.	6. Kebersihan di area wisata kurang bersih dikarenakan banyak sampah berserakan, seperti daun kering, plastik, dan bekas makanan yang dihasilkan oleh pengunjung dan warga sekitar.	6. Berada di perbatasan pulau yang lebih besar, yaitu Pulau Harapan dan Pulau Kelapa.	
		7. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.	

Berdasarkan Tabel 1, ketiadaan infrastruktur dan terbatasnya sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola ekowisata menjadi tantangan besar bagi Pulau Kelapa Dua. Namun, semangat tinggi penduduk lokal terutama kelompok perempuan untuk mempelajari hal baru dapat menjadi modal sosial yang dapat mendorong pengembangan ekowisata Kampung Bugis ini.

Solidaritas Perempuan Bugis Bone di Tengah Subordinasi Industri Ekowisata

Solidaritas merupakan salah satu aspek kajian yang berkaitan erat dengan gerakan sosial. Terdapat beberapa pengertian solidaritas sosial yang didasarkan pada konteks kemunculan maupun wujudnya. Durkheim (1984) memandang bahwa solidaritas merupakan kohesi sosial yang muncul akibat adanya struktur sosial. Pada konteks komunitas perempuan di Pulau Kelapa Dua, solidaritas yang dibangun cenderung merupakan solidaritas mekanis yang didasarkan pada kesamaan nilai dan norma. Silsilah keturunan dan pengalaman komunitas ini beradaptasi di Pulau Kelapa Dua menjadi dasar terbentuknya solidaritas sosial yang

diwariskan antar generasi. Solidaritas ini juga diperkuat dengan reproduksi struktur sosial yang diwariskan antar generasi (Bourdieu 1986).

Kemunculan solidaritas sosial juga sangat dimungkinkan oleh adanya polarisasi kelas yang memunculkan konflik antar kelas (Marx 1978). Diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi adalah beberapa manifestasi dari polarisasi kelas yang melahirkan konflik. Studi terdahulu juga menunjukkan posisi perempuan setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir masih rentan mengalami penindasan dalam pembangunan karena gagalnya pembangunan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam berbagai sektor (Dinerstein 2024; Fakier, Rätzzel, & Mulinari 2024; Lin & Wang 2023; Mezzadri et al. 2025; Setiawan & Tomsa 2023).

Masyarakat Pulau Kelapa Dua pada umumnya tidak mendapatkan akses pembangunan yang sama baiknya dengan pembangunan di Pulau Jawa (yang juga merupakan pusat pemerintahan negara) sebagai pulau utama terdekat (Adryawning & Widiyanto 2025; Pangarti et al. 2022). Kesenjangan ini seperti halnya pemikiran Said (1978) dan Spivak (1988) yang

menyatakan bahwa terdapat distingsi pembangunan antara pulau besar dan pulau-pulau kecil 'lainnya' yang dianggap tidak sepenting pulau besar dalam kelayakan mendapatkan ruang pada kebijakan pembangunan. Pulau Kelapa Dua mencerminkan ketimpangan pembangunan tersebut melalui terbatasnya fasilitas publik, seperti sekolah, akses logistik, dan akses transportasi yang menyebabkan ketergantungan pasokan logistik dari pulau lain. Berbagai keterbatasan prasarana dan sarana tersebut memunculkan alternatif penghidupan yang terbatas bagi penduduk Kelapa Dua.

Dalam dinamika masyarakat pesisir, kontribusi perempuan sering kali tidak diakui dan berujung pada subordinasi. Perempuan nelayan –yang ditafsirkan sebagai perempuan yang melaut maupun mengolah hasil tangkapan– menghadapi tantangan mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas, dan pasar. Padahal, peran perempuan nelayan dalam peningkatan ekonomi sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pratiwi & Gina 2017; Wahyuni 2017). Subordinasi terhadap penduduk perempuan di Pulau Kelapa Dua merupakan aspek laten yang perlahan mulai disadari oleh Kelompok Perempuan Bugis Bone. Kesadaran ini menjadi katalisator bagi solidaritas mekanis yang mewujud menjadi gerakan para Perempuan Bugis Bone untuk membuat ruang di tengah kontestasi mereka dalam mendapatkan alternatif penghidupan di Pulau Kelapa Dua. Rasa kesamaan nasib, ketidakberdayaan yang sama, serta ancaman yang sama, meneguhkan solidaritas mekanis yang pada awalnya telah menjadi modal bagi kelompok perempuan Bugis Bone, akhirnya mewujud menjadi gerakan sosial.

Sebagai salah satu bagian dari Kepulauan Seribu yang terkenal dengan ekowisata perairannya, Pulau Kelapa Dua memiliki daya tarik wisata mangrove, penangkaran penyu, dan keindahan bawah air. Jumlah pengunjung Pulau Kelapa Dua hampir mencapai 2.000 orang per tahun yang pada umumnya berkunjung di akhir pekan. Potensi ini turut menggerakkan roda perekonomian pulau dan mendorong terbentuknya Komunitas Pegiat Wisata Budaya dan Konservasi (Komparasi) pada tahun 2021. Selain menawarkan paket *snorkeling*, *scuba diving*, dan beragam jenis rental, komunitas ini juga mengajak pengunjung untuk melakukan pembibitan dan penanaman mangrove. Selain itu, Komparasi juga mengembangkan teknik transplantasi karang menggunakan metode rangka *spider* dengan fragmen anakan karang diletakkan pada kaki rangka yang berbentuk seperti jaring laba-laba.

Sayangnya, usaha wisata ini masih didominasi laki-laki. Dalam struktur organisasinya, terdapat 13 orang laki-laki dan dua orang perempuan yang bertugas sebagai sekretaris dan bendahara. Dengan kata lain, perempuan masih dianggap kurang cakap untuk memandu pengunjung.

Menurut Penyuluh SPTN Wilayah I Pulau Kelapa yang juga bertugas di Pulau Kelapa Dua, salah satu isu yang muncul adalah penggunaan jaring keramba apung. Jaring ini berfungsi membudidayakan jenis-jenis ikan invasif seperti bawal. Selain persoalan ikan invasif, *pelet* atau makanan ikan yang digunakan juga menimbulkan pencemaran. Situasi ini telah dicoba dan dicari solusinya, namun belum sepenuhnya ditemukan titik temu. Pihak Taman Nasional sebagai pemegang otoritas kawasan konservasi pada akhirnya masih memperbolehkan penggunaan jaring keramba apung, namun terbatas pada kebutuhan pribadi dan bukan untuk tujuan komersil. Secara bertahap, pengelola kawasan menjalin hubungan dengan pembudi daya setempat dan mengajak mereka membentuk kemitraan konservasi.

Isu lingkungan lainnya adalah rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang mangrove. Pada awalnya, mangrove dianggap sebagai tempat timbunan sampah yang kotor dan sarang hewan berbahaya. Namun, pengelola kawasan terus berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya mangrove. Hutan mangrove, terutama di pulau-pulau kecil, adalah pelindung utama pulau dari abrasi karena ketiadaan mangrove dapat mempercepat proses mundurnya garis pantai dan meluapnya air laut ke wilayah pemukiman.

Isu lingkungan ini menjadi bumerang yang dihadapi oleh seluruh penduduk Kelapa Dua. Ketergantungan mereka pada sektor ekowisata dan sektor perikanan tangkap berbanding terbalik dengan sensitivitas mengupayakan keberlanjutan ekosistem yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dominasi laki-laki dalam aktivitas produktif dan reduksi peran perempuan pada peran domestik menyebabkan kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekosistem dan perikanan di Pulau Kelapa Dua seakan tidak ada. Situasi serupa juga tidak jarang terjadi pada komunitas pesisir (Situmeang & Aflaha 2022).

“Sebelum ada program pemberdayaan dari pemerintah, ibu-ibu biasanya hanya kumpul-kumpul dan *ngga* tahu mau *ngapain*. Mayoritas di sini ibu rumah tangga, jadi banyak waktu luang. Beberapa ibu-ibu ada yang punya usaha kecil-kecilan di rumah, tetapi produksinya tidak rutin” (Ibu A 2025, Wawancara Agustus).

Subordinasi pemikiran dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya dan ekosistem bukanlah hal baru. Purbandani & Mahaswa (2022) mengemukakan relasi antara perempuan dan ekosistem atau yang dikenal dengan ekofeminisme merupakan pemikiran yang dianggap tidak menjanjikan dalam menghadapi tantangan kerusakan ekologis. Ekofeminisme sendiri merupakan perspektif teori feminis yang menghubungkan penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Teori ini muncul pada tahun 1970-an, dipopulerkan oleh Françoise d'Eaubonne (1974).

Ekofeminisme didasari pemikiran dualisme patriarki yang menciptakan hierarki dengan menempatkan perempuan (pemikiran, kemampuan, hingga eksistensi) pada posisi di bawah pemikiran laki-laki (sebagai subordinat), eksploitasi terhadap alam yang secara paralel juga melakukan eksploitasi pada perempuan (d'Eaubonne 1974; Merchant 1983; Mies & Shiva 2014). Ekofeminisme juga mengkritik keras pemikiran patriarki yang memisahkan relasi perempuan dan alam tetapi pada sisi lain berupaya membatasi ruang gerak dan pemikiran perempuan semata-mata pada peran-peran reproduktif yang justru berkaitan erat dengan alam (Plumwood 1993; Ruether 1994; Salleh 1997).

Di tengah sumber daya perairan yang melimpah, perempuan Pulau Kelapa Dua masih terhimpit berbagai permasalahan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Keputusan dalam mengelola sumber daya alam dalam kerangka ekowisata masih dikuasai oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari belum adanya perempuan yang menjadi pemimpin *tour guide* atau penggerak konservasi mangrove dan penyu. Padahal, keterikatan perempuan Pulau Kelapa Dua dengan alam sekitarnya sangat tinggi. Mereka butuh kesadaran dan ruang yang lebih luas lagi untuk dapat memiliki andil dalam pengelolaan ekowisata.

Sejatinya, perempuan Pulau Kelapa Dua memiliki kemauan untuk belajar dan berwirausaha. Salah satu faktor pendorong solidaritas perempuan dalam meningkatkan taraf ekonomi di Pulau Kelapa Dua adalah keberadaan Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Pulau Kelapa, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Sebelum adanya peran institusi ini, perempuan di Pulau Kelapa Dua tidak mendapatkan cukup rekognisi sebagai subyek pembangunan. Aktivitas produktif dan ruang-ruang pengambilan keputusan pembangunan cenderung memprioritaskan penduduk laki-laki yang dianggap sebagai perwakilan dari masing-masing keluarga.

Bias pemikiran dalam ruang pembangunan ini bukanlah hal baru di Indonesia. Sudaryat, Yuanitasari, & Judiasih (2024) serta Widiastuti et al. (2024) juga menyoroti hal tersebut pada kasus-kasus implementasi program pelatihan dan pemberdayaan yang menempatkan perempuan secara struktural jarang mendapat akses pelatihan dan hambatan akses menyebabkan laki-laki lebih terakomodasi.

Salah satu program SPTN adalah pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.22/menhut-II/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan, SPKP adalah organisasi masyarakat di tingkat desa yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah berbagai pihak di wilayah desa dalam upaya melestarikan fungsi serta manfaat hutan dan lahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pulau Kelapa dan Pulau Kelapa Dua Kepulauan Seribu termasuk ke dalam SPKP Bintang Laut.

Salah satu program SPKP Bintang Laut yang berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Produk unggulan KUBE SPKP Bintang Laut adalah kerupuk ikan, kripik ikan selar, dan stik cumi. Dalam sebulan, produksi stik cumi dapat mencapai dua hingga tiga kali dengan total sekitar 200 kg. Bahan dasar produksi ini dibeli langsung dari nelayan cumi di sekitar Pulau Kelapa dan Pulau Kelapa Dua.

Pada awalnya, perempuan Pulau Kelapa Dua tersegmentasi menjadi kelompok barat, tengah, dan timur sehingga program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini diinisiasi oleh pemerintah kurang dapat berjalan maksimal. Di awal tahun 2025, salah satu penyuluh perempuan SPTN Wilayah I Pulau Kelapa yang bekerja sama dengan dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor serta fasilitator seni rupa dari Yogyakarta mencanangkan program 1000 Srikandi sebagai wadah yang menyatukan tiga kelompok perempuan Pulau Kelapa Dua. Intervensi inilah yang membangkitkan solidaritas mekanis yang sebelumnya hanya diikat oleh kesamaan silsilah Bugis Bone.

Seribu Srikandi memiliki tujuan memberdayakan perempuan Pulau Kelapa Dua melalui pengolahan sampah plastik dan konservasi ekosistem mangrove dengan metode *eco-fee*. Sampah plastik di pulau dibersihkan dan dilelehkan, kemudian dibentuk menjadi kerajinan tangan, seperti kalung, anting,

dan gantungan kunci yang bernilai jual. Dengan membeli produk ini, konsumen turut berpartisipasi dalam konservasi mangrove Pulau Kelapa Dua karena sebagian keuntungan digunakan untuk pembibitan dan penanaman mangrove. *Upscaling* sampah seperti ini dapat menjadi alternatif solusi peningkatan pendapatan karena secara *supply*, sampah plastik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga selalu tersedia di pulau. Melalui program 1000 Srikandi, perempuan Pulau Kelapa Dua dapat memahami dengan lebih baik pentingnya ekosistem mangrove di lingkungan tempat tinggal mereka dan memiliki andil dalam menyebarkan pesan-pesan konservasi mangrove kepada pengunjung.

Pasca adanya intervensi yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor bersama mitra lainnya, perempuan di Pulau Kelapa Dua mulai menunjukkan peningkatan kapasitas serta semangat dalam mengembangkan peran mereka di sektor ekowisata dan ekonomi lokal. Berbagai program pelatihan telah mendorong terbentuknya kemandirian, mulai dari pengelolaan limbah non-plastik untuk menghasilkan produk bernilai guna, hingga pelatihan literasi keuangan yang memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola usaha mikro.

Selain itu, pelatihan interpretasi dan pemandu wisata membuka peluang baru bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekowisata, tidak hanya sebagai penyedia produk, tetapi juga sebagai aktor yang mengedukasi wisatawan mengenai konservasi laut, mangrove, dan penyu. Dukungan dari lembaga lain, seperti organisasi non-pemerintah dan Taman Nasional Kepulauan Seribu, semakin memperkaya jenis keterampilan yang dimiliki, baik dalam aspek teknis maupun manajerial. Serangkaian aktivitas ini bukan hanya meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, memperluas jejaring, serta menumbuhkan rasa percaya diri mereka sebagai motor penggerak ekonomi keluarga dan komunitas.

Subordinasi yang awalnya membuat perempuan di Pulau Kelapa Dua tidak tampak memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan ekosistem, ternyata menjadi katalisator bagi kelompok Perempuan Bugis Bone untuk melahirkan gerakan sosial yang tidak hanya menjadi solusi bagi keterbatasan akses, tetapi juga membawa manfaat terhadap ekosistem. Dengan memanfaatkan dasar solidaritas sosial yang telah ada, Program 1000 Srikandi menjadi alternatif baru bagi perempuan dalam menciptakan ruang bagi mereka untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Pulau Kelapa Dua.

Gerakan 1000 Srikandi yang datang dari luar komunitas, menjadi peluang politik bagi kelompok perempuan Bugis Bone untuk tampil dalam pembangunan di Pulau Kelapa Dua. Gerakan ini sejalan dengan teori konteks eksternalitas (Tarrow 1994; Tilly 1978) yang memungkinkan terjadinya mobilisasi sumber daya internal akibat adanya lingkungan pemungkin yang efektif dari pihak eksternal. Kemunculan gerakan berbasis gender akibat adanya dukungan eksternalitas ini masih relevan dengan situasi saat ini. Studi (Anyidoho, Crawford, & Medie 2021) di Ghana misalnya menjelaskan koalisi politik berhasil memperkuat gerakan perempuan dalam mengawal implementasi kebijakan terhadap kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan di Ghana.

Penutup

Gejolak ekonomi pascapandemi COVID-19 masih terasa dampaknya hingga tahun 2025, termasuk pada komunitas masyarakat pesisir Pulau Kelapa Dua yang didominasi oleh keturunan pelaut Bugis Bone. Profesi nelayan semakin ditinggalkan oleh laki-laki Pulau Kelapa Dua akibat ketidakpastian hasil tangkap dan semakin langkanya anak buah kapal (ABK). Di tengah krisis ini, perempuan Bugis Kelapa Dua berupaya menyokong perekonomian keluarga dengan membuat usaha oleh-oleh mengingat tingginya jumlah pengunjung ekowisata Pulau Kelapa Dua yang menawarkan keindahan alam bahari, penanaman mangrove, serta penangkaran penyu.

Akan tetapi, industri ekowisata Pulau Kelapa Dua masih bersifat *top-down* dan didominasi oleh laki-laki. Perempuan kurang mendapat kesempatan untuk mengelola ekowisata sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terkait dengan hal ini, intervensi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi katalis yang sangat berpengaruh dalam mendorong solidaritas perempuan Pulau Kelapa Dua. Taman Nasional Kepulauan Seribu menggerakkan perempuan dengan Koperasi Usaha Bersama (KUBE) yang membimbing perempuan Pulau Kelapa Dua untuk mengolah hasil laut menjadi makanan ringan. Di samping itu, terdapat 1000 Srikandi yang diinisiasi oleh salah satu penyuluh perempuan SPTN Wilayah I Pulau Kelapa yang bekerja sama dengan dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor dan fasilitator seni rupa dari Yogyakarta. Seribu Srikandi memberikan penyadaran perempuan tentang potensi *upscale* limbah plastik menjadi kerajinan tangan yang bernilai. Kedua program ini menjadi pendorong perempuan untuk dapat berkontribusi lebih besar lagi

dalam menggerakkan ekowisata Pulau Kelapa Dua melalui usaha oleh-oleh.

Perempuan Pulau Kelapa Dua berharap, pemerintah dapat membantu pemasaran produk-produk KUBE dan 1000 Srikandi mengingat tingginya ongkos kirim dari Pulau Kelapa Dua jika penjualan ke luar pulau dilakukan secara pribadi. Selain itu, untuk menarik pengunjung pulau agar membeli produk-produk KUBE dan 1000 Srikandi, dibutuhkan sentra khusus oleh-oleh di dekat dermaga pulau. Pembinaan UMKM pun harus terus dilakukan demi terciptanya ekosistem usaha yang berkelanjutan dan secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup perempuan Pulau Kelapa Dua.

Daftar Pustaka

- Adryawning, V. A. & Widiyanto, D. 2025. "Analisis Hubungan Tingkat Perkembangan Wilayah dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia." *Region* 20(1). doi:<https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>.
- Anyidoho, N. A., Crawford, G., & Medie, P. A. 2021. "The Role of Women's Movements in the Implementation of Gender-Based Violence Laws." *Politics & Gender* 17(3):427–53. doi:<https://doi.org/10.1017/S1743923X19000849>.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Kabupaten Kepulauan Seribu dalam Angka 2024. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik Kepulauan Seribu.
- Bahri, A. D., Hamdani, A., & Wibowo, A. 2017. "Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya?" https://www.researchgate.net/publication/321028063_Di_Balik_Krisis_Agraria_dan_Ekosistem_Kepulauan_Seribu_Apakah_Wisata_Bahari_adalah_Jawabannya.
- Bourdieu, P. 1986. "The Forms of Capital." Pp. 241–58 in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press: New York.
- Dinerstein, A. C. 2024. "On Motley Feminism: A Decolonising Marxism for a Thesis 14 of Marxism-Feminism." *Capital & Class* 48(2). doi:<https://doi.org/10.1177/03098168241234112>.
- Durkheim, E. 1984. *The Division of Labor in Society*. The Macmillan Press Ltd.
- d'Eaubonne, F. 1974. "Le Féminisme Ou La Mort." *Les Cahiers Du GRIF* 4, pp. 66–67.
- Fakier, K., Rätzzel, N., & Mulinari, D. 2024. "Opening Conversations with Marxist Feminists: A Response to the Symposium on Marxist-Feminist Theories and Struggles Today." *Rethinking Marxism* 36(2), pp. 170–174.
- Farhan, A. R. & Lim, S. 2014. "Assessment of Ocean and Coastal Policy Effectiveness in Seribu Islands, Indonesia." *International Journal of Geoinformatics* 10(3). <https://journals.sfu.ca/ijg/index.php/journal/article/view/435>.
- Goodman, L. A. 1961. "Snowball Sampling." *The Annals of Mathematical Statistics* 32(1), pp. 148–170. doi:<https://doi.org/10.1214/aoms/1177705148>.
- Indrajaya, A. N. et al. 2018. "Upaya Peningkatan Pariwisata di Pulau Kelapa Dua Kepulauan Seribu Melalui Model Ecotourism dengan Mengoptimasi Aktivitas Marketing Melalui Social Media." Jakarta, Indonesia: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Kelurahan Pulau Kelapa. 2024. "Profil Kelurahan Pulau Kelapa Kabupaten Kepulauan Seribu." <https://pulauseribu.jakarta.go.id/kelurahan/kelapa/>.
- Lin, J. & Wang, Y. 2023. "Back to Marx: Reflections on the Feminist Crisis at the Crossroads of Neoliberalism and Neoconservatism." *Humanities and Social Sciences Communications* 10(1), pp. 954. doi:[10.1057/s41599-023-02341-2](https://doi.org/10.1057/s41599-023-02341-2).
- Marx, K. 1978. Critique to the Gotha. In T. Borodulina Ed. *Marx, Engels, Lenin on Communist Society*. Progress Publishers: Moscow.
- Merchant, C. 1983. *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*. HarperOne.
- Mezzadri, A. et al. 2025. "Pluralizing Social Reproduction Approaches." *International Feminist Journal of Politics* 27(1), pp. 6–33. doi:<https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2447594>.
- Mies, M. & Shiva, V. 2014. *Ecofeminism*. Zed Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications, Inc: California.
- Nainggolan, F. 2018. "Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Kelapa Dua, Taman Nasional Kepulauan Seribu, DKI Jakarta." Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
- Noor, Y. R., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. 2006. *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. Bogor, Indonesia: PHKA/WI-IP.
- Onggang, A. we. 2020. "Kisah Mayat Misterius, Nasib Nelayan Bugis dan Preman di Kelapa Dua, Kepulauan Seribu." PINISI.co.id, 28 November.
- Panggarti, U. et al. 2022. "Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau di Indonesia." *Forum Ekonomi* 24(2), hlm. 288–298. doi:<https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>.
- Plumwood, V. 1993. *Feminism and the Mastery of Nature*. Routledge: London.
- Pratiwi, A. M. & Gina, A. 2017. "Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama Yang Bias." *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 295–309. doi:<https://doi.org/10.34309/jp.v22i4.203>.
- Pristiandaru, D. L. 2023. "7 Taman Nasional Indonesia yang Masuk ASEAN Heritage Park." *Kompas.com*, 1 Juni.
- Purbandani, A. M. & Mahaswa, R. 2022. "Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, dan Krisis Iklim." *Jurnal Perempuan* 27(3), hlm. 227–239. doi:<https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.733>.
- Ruether, R. R. 1994. *Gaia and God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing*. HarperSanFrancisco: San Fransisco.
- Runtu, C. D., Samosir, A. M., & Pratiwi, N. T. M. 2024. "Pengembangan Ekowisata di Area Konservasi Penyu Pulau Kelapa Dua Taman Nasional Kepulauan Seribu." Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

- Sachoemar, S. I. 2008. "Evaluasi Kondisi Lingkungan Perairan Kepulauan Seribu Evaluasi Kondisi Lingkungan Perairan Kepulauan Seribu." *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 4(1), hlm. 19–26. doi:10.29122/jrl.v4i1.1839.
- Said, E. W. 1978. *Orientalism*. Pantheon Books: New York.
- Salleh, A. 1997. *Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the Postmodern*. Zed Books: London.
- Setiawan, K. M. P. & Tomsa, D. 2023. "Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42(3). doi:https://doi.org/10.1177/18681034231209058.
- Situmeang, W. H. & Aflaha, F. A. 2022. "Ragam Modal Perempuan Perdesaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Tengah Subordinasi." *Jurnal Perempuan* 27(3), hlm. 241–253. doi:https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.
- Spivak, G. C. 1988. "Can the Subaltern Speak?" in *Marxism and the Interpretation of Culture*. Macmillan: London.
- Sudaryat, S., Yuanitasari D., & Judiasih, S. D. 2024. "Policy and Implementation of Gender Equality in Indonesian Mining Companies as an Approach to Achieve the Goals of Indonesian SDGs." *Cogent Social Sciences* 10(1). doi:10.1080/23311886.2024.2400602.
- Taman Nasional Kepulauan Seribu. 2024. *Data Kunjungan Taman Nasional Kepulauan Seribu 2018-2024*. Jakarta, Indonesia.
- Taman Nasional Kepulauan Seribu. 2025. "Sejarah Kawasan." <http://tnlkepulauanseribu.net/sejarah-kawasan/>.
- Tarrow, S. 1994. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tilly, C. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Newbery Award Records, Inc.: New York.
- Wahyuni, Y. 2017. "Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Masyarakat Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara." *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 345–357. doi:https://doi.org/10.34309/jp.v22i4.203.
- Widiastuti, T. et al. 2024. "Capturing the Barriers and Strategic Solutions for Women Empowerment: Delphi Analytical Network Process." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 10(3). doi:10.1016/j.joitmc.2024.100345.
- Yunus, S. R. 2015. "Masyarakat Kepulauan: Yang Bertahan dari Rakitang." *Kompas.id*, 28 Agustus.